

Media Online	Tribun Timur
Tanggal	Rabu, 4 Juni 2025
Wilayah	Kabupaten Wajo



Wajo Pertahankan WTP Selama 14 Tahun



TRIBUN-TIMUR.COM - Pemkab Wajo raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penghargaan diumumkan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, di Auditorium BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (4/6/2025).

Capaian ini menjadi yang ke-14 kalinya diraih Pemkab Wajo secara berturut-turut. Juga menjadi pencapaian pertama di masa kepemimpinan Andi Rosman bersama Baso Rahmanuddin selaku Bupati dan Wakil Bupati Wajo, setelah resmi dilantik pada 20 Februari 2025. Andi Rosman hadir didampingi Baso Rahmanuddin. Hadir juga Ketua DPRD Wajo Firmansyah Perkesi, serta jajaran perangkat daerah. Andi Rosman mendapat kehormatan mewakili enam kabupaten menyampaikan sambutan di hadapan jajaran BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan. "Hari ini kita menerima hasil audit dari BPK Sulsel. Saya diberikan kepercayaan mewakili enam kabupaten. Terima kasih atas amanah ini," ujarnya. Andi Rosman menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kerja profesional BPK selama proses audit berlangsung. "Tentu, capaian ini tidak lepas dari peran BPK yang sejak awal memberikan arahan dan dorongan. Berkat itu, laporan keuangan Pemkab Wajo bisa disusun dengan baik dan menghasilkan hasil yang memuaskan," katanya. Ia menambahkan, kewajiban melaporkan keuangan daerah kepada BPK, amanat undang-undang, dan hasilnya menjadi tolak ukur tata kelola keuangan. "Alhamdulillah, enam kabupaten termasuk Wajo berhasil meraih opini WTP," katanya.

Tak lupa, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Wajo atas raihan opini WTP ke-14 kali ini. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif dan mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik. "Intinya, semua elemen harus terus bekerja dengan menjunjung prinsip good governance. Jika ini dijaga, saya yakin WTP akan terus bisa kita raih," tegasnya. Sementara itu, Kepala BPK Sulawesi Selatan Winner Franky Halomoan menyatakan pemeriksaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024. "BPK diberi amanat untuk memeriksa laporan keuangan daerah, tujuannya agar dapat memberikan keyakinan memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut," jelasnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan sistem keuangan berjalan sesuai ketentuan. "Kabupaten Wajo, kami ucapkan selamat atas opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini yang ke-14 kalinya secara berturut-turut," ujarnya. (*)